

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak. Indonesia*: Bhuna Ilmu Populer.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana. Indonesia*: Rineka Cipta.
- Harun, M., Wati, B. E. (2021). *Hukum pidana anak. Indonesia*: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Indah S, C. M. (2014). *Perlindungan Korban Edisi 2: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Indonesia*: Kencana Prenada Media Group.
- M., Zuliah, A. (2015). *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Indonesia: Refika Aditama.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Moeljanto. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. (Cetakan kedelapan, edisi revisi). Renika Cipta.
- Muliyono, A., Royani, E., & Wulandari, S. (2020). *Hak restitusi tindak pidana pencabulan anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Mulyadi, M., Syahputra, R., Lubis, A., & Zainal, H. (2024). *Restitusi: Hak mutlak bagi korban tindak pidana*. USU Press.
- Nuronyah, W. (2022). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha

Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia, M. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2022). *Viktimologi perlindungan korban & saksi. Indonesia*: Sinar Grafika.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Indonesia: Graha Ilmu.

Artikel Jurnal:

Adika, N., Surata, I. N., & Ardana, P. S. (2024). Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 11(2), 31-58.

Apriyani, M. N. (2021). *Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Risalah Hukum*, 1-10. DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>

Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). *Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 57-68. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>.

Batian, I. A. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32-41. DOI: <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>.

- Hapsari, A. S., & Fitriono, R. A. (2024). Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid. Sus/2023/PN. Skt. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, 1(3), 101-113. DOI: <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.430>
- Ismail, S. A., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). *Analisis putusan tindak pidana pemerkosaan pada anak di bawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 115/PID.sus/2022/PN.LBO)*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1(3), 1–12. DOI: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.300>.
- Khatami, M. R., Firganefi, F., & Evendia, M. (2023). Analysis of The Fulfillment of Restitution Rights for Child Victims Of Sexual Violence Crime. Pranata Hukum, 18(1), 60-74. DOI: <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i1.297>.
- Lubis, M. M. (2020). *Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual (Studi penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 1(1), 189-190. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1>
- Marasabessy, F. (2016). *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(1), 53-75.
- Octaviani, A. V., Rahman, S., & Razak, A. (2022). *Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Journal of Lex Theory (JLT), 3(2), 98-115. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlt.v3i2.1515>.

- Pradana, H., & Najmawati, S. (2023). Efektivitas Peran DP2PA dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1(1), 57-70. DOI: <https://doi.org/10.21093/jm.v1i1.5861>.
- Prastya, T., Ismed, M., & Fitrian, A. (2024). Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Atas Pelaksanaan Restitusi Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(10), 719-727. DOI: <https://doi.org/10.62335/y7ybm20>.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159. DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.
- Suhastini, N., & Fitriana, H. (2022). Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(3).
- Sumera, M. (2013). *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. *Lex et Societatis*, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.
- Suryamizon, A. L. (2017). *Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia*. Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.
- Tarigan, D. P., Shodiq, M., & Ismed, M. (2025). *Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan demi Kepastian*

Hukum. Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, 2(1), 336-345.

DOI: <https://doi.org/10.62335/q3e83712>.

Umar, C. S. (2021). Tinjauan hukum pidana dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pasal 81 uu no. 17 tahun 2016. *Lex crimen*, 10(2).

Hasil Penelitian/Tugas Akhir:

Aufiyaturin, Q, “*Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Maqasid Syariah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri.

Dewi, M. P. *Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia.

Nurina, P. P, “*Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang*”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung.

Internet:

1187 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2023, <https://dp3ap2.jogjapro.go.id>, diakses 15 September 2024.

KBBI Daring. (2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 25 September 2024.

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman,” <https://sipp.pn-sleman.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta,” <https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bantul,” <https://sipp.pn-bantul.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonosari,” <https://sipp.pn-wonosari.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wates,” <https://sipp.pn-wates.go.id/>, diakses pada 28 November 2024.

Peraturan Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 8.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263.

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan
Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.